



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
4. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
5. Kinerja SKPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan SKPD sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi SKPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
7. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh SKPD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
8. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
9. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi : (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pasal 2

IKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

Keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada setiap tingkatan SKPD harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 4

IKU digunakan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. penyusunan rencana strategis (RENSTRA SKPD);
- d. penyusunan rencana kerja (RENJA SKPD);
- e. penyusunan dokumen penetapan kinerja (TAPKIN SKPD);
- f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP);
- g. evaluasi kinerja SKPD; dan
- h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD;
- i. penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.

Pasal 5

Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dan pemantauan dalam pengembangan dan pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 6

Pimpinan SKPD melakukan :

1. pembinaan dalam penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan IKU di lingkungan masing-masing;
2. koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban;
3. pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan masing-masing.

Pasal 7

- (1) inspektorat kabupaten melakukan evaluasi kinerja di setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka memastikan keandalan dan keakuratan informasi.
- (2) pelaporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Dalam hal IKU ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja SKPD secara keseluruhan, pimpinan SKPD melaporkan kepada Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 11 November 2013

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 12 November 2013

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


YOHANA ENDANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013
NOMOR 303

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Kapuas Hulu


Elisabetta, S.H., M.Si
Kabupaten Kapuas Hulu
19741021490002010

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 2 TAHUN 2013
 TANGGAL OKTOBER 2013
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	SASARAN	NOMOR	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah dan pemerintah desa	1	Jumlah kelurahan/desa yang tertib administrasinya	Badan Pemberdayaan Desa Perempuan dan KB
		2	Jumlah Pengiriman Pegawai pada Tugas Belajar kedinasan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		3	Persentase pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		4	Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5	Jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku	SEKERTARIAT DAERAH
		6	Jumlah kecamatan yang tertib administrasinya	SEKERTARIAT DAERAH
		7	Jumlah batas wilayah yang telah ditetapkan	SEKERTARIAT DAERAH
2	Mengembangkan nilai-nilai budaya kerja aparatur yang maju dan kondusif	1	Turunnya indikasi penyimpangan anggaran	Inspektorat
		2	Jumlah publikasi daerah yang telah diterbitkan	SEKRETARIAT DAERAH
		3	Kualitas pelayanan kerumahtanggaan	SEKRETARIAT DAERAH
3	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	1	Pelaporan Keuangan tepat waktu	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		2	Prosentase aset tanah milik Pemerintah Daerah yang telah bersertifikat	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		3	Prosentase barang milik daerah yang telah terdaftar	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		4	Opini laporan keuangan Pemerintah Daerah	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5	Penyusunan LKPJ Kabupaten tepat waktu	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		6	Penyusunan LAKIP Kabupaten tepat waktu	SEKRETARIAT DAERAH
		7	Penyusunan LAPPD Kabupaten tepat waktu	SEKRETARIAT DAERAH
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Penerbitan Izin Mendirikan bangunan	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
		2	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
		3	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
		4	Prosentase kepemilikan KTP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		5	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		6	Rasio bayi berakte kelahiran	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		7	Angka pertumbuhan penduduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

		8	Jumlah perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang telah diterbitkan	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
		9	Cakupan rata-rata proses penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
		10	Keberadaan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH
		11	Prosentase Luas lahan bersertifikat	SEKRETARIAT DAERAH
		12	Tersedianya sarana dan prasarana umum	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		13	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		14	Kontribusi bidang perhubungan, komunikasi dan informasi terhadap PDRB	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		15	Jumlah retribusi perpajakan	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		16	Jumlah sistem Informasi dan Komunikasi Manajemen Pemda	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		17	Pengelolaan Website Pemda	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah	1	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD tahun berjalan	SEKRETARIAT DEWAN
		2	Prosentasi terlaksananya agenda kedewanan sesuai dengan rapat Badan Musyawarah DPRD	SEKRETARIAT DEWAN
		3	Prosentase kenaikan PAD dari tahun sebelumnya	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		4	Prosentase PAD dibanding total Penerimaan APBD	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5	Prosentase kenaikan Pajak Daerah dari tahun sebelumnya	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		6	Prosentase Retribusi Daerah dibanding Penerimaan Daerah	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
6	Memperkuat koordinasi dan hubungan kerja pemerintah daerah dalam lingkup internal maupun eksternal	1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2	Jumlah LSM/Ormas	SEKRETARIAT DAERAH
		3	Jumlah LSM/Ormas yang terdaftar	SEKRETARIAT DAERAH
7	Mengembangkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi	1	Tersedianya website Pemerintah Daerah Kapuas Hulu	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

8	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Prosentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta) 2 Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 3 Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 4 Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 5 Angka Partisipasi Sekolah 6 Ratio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia sekolah 7 Ratio Guru / Murid 8 Angka Melek huruf 9 Angka Rata-Rata Lama Sekolah 10 Angka Partisipasi kasar 11 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan 12 Angka Putus Sekolah 	<p>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</p>
9	Mengembangkan nilai-nilai budaya serta memelihara aset-aset budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jumlah kunjungan wisatawan (domestik) 2 Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah 3 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 	<p>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</p> <p>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</p> <p>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</p>
10	Menjamin terselenggaranya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rasio guru terhadap murid berkebutuhan khusus 2 Jumlah sekolah anak berkebutuhan khusus 3 Jenis sekolah anak berkebutuhan khusus 	<p>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</p> <p>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</p> <p>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</p>
11	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Prosentase Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 2 Prosentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan 3 Tingkat kepuasan pelanggan RSUD 4 Ratio dokter persatuan penduduk 5 Ratio tenaga medis persatuan penduduk 6 Ratio sarana kesehatan persatuan penduduk 	<p>RSUD Ahmad Diponegoro</p> <p>RSUD Ahmad Diponegoro</p> <p>RSUD Ahmad Diponegoro</p> <p>DINAS KESEHATAN</p> <p>DINAS KESEHATAN</p> <p>DINAS KESEHATAN</p>

12	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1 Cakupan peserta KB aktif 2 Prosentase Kecamatan bebas rawan gizi 3 Angka Kematian Balita per 1.000 4 Umur Harapan Hidup 5 Angka Kejadian Gizi Buruk 6 Angka Kematian Ibu Bersalin 7 Prosentase peserta Jamkesmas keluarga Miskin 8 Jumlah regulasi jaminan kesehatan 	<p>BADAN PEMBERDAYAAN DESA PEREMPUAN DAN KB</p> <p>DINAS KESEHATAN</p> <p>DINAS KESEHATAN</p> <p>DINAS KESEHATAN</p> <p>DINAS KESEHATAN</p> <p>DINAS KESEHATAN</p> <p>DINAS KESEHATAN</p>
13	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama masyarakat dalam lingkup internal maupun antar agama	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jumlah tempat ibadah 	SEKRETARIAT DAERAH
14	Meningkatkan prestasi kepemudaan dan keolahragaan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jumlah Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) per 1.000 penduduk 2 Jumlah Organisasi Olah raga 3 Jumlah Organisasi Kepemudaan 4 Jumlah cabang olahraga yang berprestasi 	<p>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</p>
15	Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan serta keadilan gender	<ol style="list-style-type: none"> 1 Prosentase Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas 2 Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan 3 Prosentase PKK Aktif 4 Prosentase Posyandu 5 Rasio KDRT 6 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 	<p>BADAN PEMBERDAYAAN DESA PEREMPUAN DAN KB</p>
16	Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada orang cacat, orang lanjut usia dan penyandang masalah sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1 Angka Kriminalitas Yang tertangani 2 Tingkat penyelesaian pelanggaran 3 Persentase (%) korban bencana skala kab. Yang menerima bantuan sosial selama masa 4 Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi 5 Prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 6 Prosentase Keluarga Miskin yg memperoleh bantuan (mis : Raskin) 7 Ratio Penduduk Yang Bekerja 	<p>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p> <p>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p> <p>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p>DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN SOSIAL</p>

		8 Angka Kelangsungan Hidup bayi	DINAS KESEHATAN
		9 Angka Usia Harapan Hidup	DINAS KESEHATAN
		10 Persentase Balita Gizi Buruk	DINAS KESEHATAN
17	Meningkatkan ketersediaan lahan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum	1 Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi Lokasi Prioritas (Lokpri)	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
18	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah sebagai sarana distribusi barang, orang dan jasa	1 Prosentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
		2 Prosentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
		3 Prosentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
		4 Prosentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
		5 Prosentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
		6 Jumlah Jembatan dengan kondisi baik	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
		7 Jumlah Jembatan dengan kondisi sedang	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
		8 Jumlah Jembatan dengan kondisi rusak	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
19	Meningkatkan jalur transportasi dan komunikasi ke wilayah terpencil, terisolir dan perbatasan	1 Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam kabupaten	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
20	Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah terpencil, terisolir dan perbatasan	1 Tersedianya dokumen pengembangan kawasan Perbatasan	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
		2 Terpeliharanya tapal batas	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
21	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI
22	Meningkatnya pendapatan petani, peternak, nelayan dan pengolah produk pertanian	1 Produktivitas komoditas kehutanan dan perkebunan	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
		2 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
		3 Produksi komoditas pangan utama	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
		4 Produktivitas komoditas pangan	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
		5 Produksi komoditas hortikultura	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
		6 Produktivitas komoditas hortikultura	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
		7 Prosentase Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
		8 Tingkat konsumsi daging	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

		9	Jumlah Ternak	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
		10	Produksi daging	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
		11	Produksi telur	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
		12	Jumlah produksi perikanan	DINAS PERIKANAN
		13	Prosentase kontribusi Perikanan terhadap PDRB	DINAS PERIKANAN
		14	Tingkat Konsumsi ikan masyarakat	DINAS PERIKANAN
		15	Keberadaan regulasi ketahanan pangan	SEKRETARIAT DAERAH
		16	Stabilitas harga dan pasokan pangan	SEKRETARIAT DAERAH
		17	Penanganan daerah rawan pangan	SEKRETARIAT DAERAH
23	Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat miskin	1	Jumlah pasar desa	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI
24	Meningkatkan produktivitas industri rumah tangga, industri kecil/menengah dan koperasi	1	Prosentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI
		2	Jumlah pasar pemda	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI
25	Meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	1	Penyerapan Tenaga Kerja oleh Koperasi dan UKM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI
26	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan sadar hukum	1	Jumlah gangguan KAMTIBMAS	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		2	Jumlah demonstrasi yg ditujukan kepada Pemerintah Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		3	Angka Kriminalitas	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
27	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan ketenagakeriaan	1	Prosentase Tingkat partisipasi angkatan kerja	DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
		2	Tingkat Pengangguran	DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
		3	Angka partisipasi angkatan kerja	DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
		4	Angka sengketa pengusaha-pengusaha pertahun	DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
		5	Rasio daya serap tenaga kerja	DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
28	Menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan	1	Nilai Investasi yang direalisasi	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
		2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

29	Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain	<ol style="list-style-type: none"> 1 Laju Inflasi 2 Pendapatan Perkapita 3 Indeks Gini 	<p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p>
30	Mengendalikan laju perubahan alih fungsi lahan dan fungsi hutan sehingga tercipta keseimbangan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Prosentase Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 2 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 3 Kerusakan Kawasan Hutan 4 Luas Lahan yang direboisasi 	<p>DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN</p> <p>DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN</p> <p>DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN</p> <p>DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN</p>
31	Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan lingkungan usaha yang memperhatikan kelestarian lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan 2 Prosentase Rumah tangga pengguna air bersih 3 Persentase rumah tinggal bersanitasi 4 Rasio rumah layak huni 5 Rasio permukiman layak huni 6 Tersedianya sistem air limbah skala 7 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan 	<p>DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG</p> <p>KANTOR LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>KANTOR LINGKUNGAN HIDUP</p>
32	Menurunnya kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. 2 Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 	<p>DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG</p> <p>KANTOR LINGKUNGAN HIDUP</p>
33	Meningkatnya pola dan kualitas pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan		

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR